

Kebijakan Ekonomi Calon Presiden Nasionalis dan Perangkap Pembiayaan Asing

Ahmad Alamsyah Saragih

Memo Kebijakan #1, 2014

PENGANTAR.

Indonesia sedang menjalani proses pemilihan pemimpin bangsa untuk ketiga kalinya, yang dilakukan secara langsung. Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang akan diselenggarakan 9 Juli 2014, diikuti oleh dua orang kandidat presiden. Calon Presiden (Capres) nomor urut satu (Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa) dan Capres nomor urut dua (Joko Widodo dan Jusuf Kalla). Kedua pasangan capres telah mengikuti Debat putaran kedua, yang bertopik: Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Dalam debat tersebut, yang diselenggarakan pada 15 Juni 2014, kedua Calon Presiden mengemukakan pandangan dan sikap mereka tentang permasalahan ekonomi dan pemecahannya, jika terpilih menjadi Presiden nanti. Untuk menilai argumen kedua Calon Presiden, sebagai referensi bagi pemilih, sekaligus memberikan perspektif kritis terhadap pandangan dan sikap kedua Calon Presiden, Paper ini disusun. Tinjauan kebijakan ekonomi kedua Calon Presiden juga didasarkan pada dua dokumen Visi-Misi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah diserahkan secara resmi kepada KPU.

KEMISKINAN VERSUS PERTUMBUHAN.

Dalam menetapkan target kebijakan ekonomi kedua Calon Presiden memiliki cara pandang yang berbeda. Jokowi lebih berfokus pada upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan inklusi keuangan. Prabowo mengincar kenaikan pendapatan per kapita melalui pertumbuhan ekonomi di atas 10% per tahun dan

menurunkan kesenjangan dengan target *gini ratio* turun ke tingkat di bawah masa pemerintahan SBY. Perbedaan ini seolah menghadirkan kembali polemik klasik kebijakan ekonomi: kemiskinan versus pertumbuhan.

Kebijakan ekonomi Prabowo merupakan jawaban bagi kalangan yang merindukan kejayaan ekonomi pro pertumbuhan berbasis kekayaan alam di era awal Rezim Orde Baru. Pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2013 mencapai Rp. 36,5 juta. Pertanyaan bagi Prabowo adalah bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita menjadi Rp. 60 juta (naik 64%) dalam kurun waktu 5 tahun masa pemerintahan mendatang, namun dalam waktu bersamaan juga menargetkan tingkat kesenjangan menurun drastis dari 0,41 menjadi 0,31?

Jokowi tidak menargetkan pertumbuhan, melainkan ingin menurunkan angka kemiskinan yang mencapai 11,7 % pada 2013 menjadi hampir separuh, yakni 5%-6% pada 2019.

Di sisi lain, Jokowi ingin meningkatkan inklusi keuangan (akses terhadap lembaga keuangan formal) warga menjadi 50. Sebagai dasar, Bank Indonesia menyatakan pada 2013 tingkat inklusi keuangan Indonesia terendah di ASEAN, yakni 20 dari skala 100. Meski sama-sama mengusung kedaulatan ekonomi, basis kebijakan ekonomi kedua kandidat tampak berbeda.

Secara umum, Prabowo berfokus pada upaya memacu laju pertumbuhan ke tingkat sangat tinggi yang dibangun dengan ekonomi berbasis sumber daya alam. Sementara

Jokowi lebih berfokus pada pengurangan kemiskinan melalui pembenahan tata niaga dengan instrumen insentif/disinsentif, baik fiskal maupun non fiskal.

MEMBANGUN IKLIM INVESTASI.

Iklm investasi Indonesia menduduki peringkat ke 120 dari 189 negara (*Doing Business 2014, The World Bank*). Peringkat ini ditentukan oleh beberapa faktor yang menjadi prasyarat agar suatu perekonomian menjadi lebih atraktif. Iklim investasi juga mencerminkan daya saing perekonomian suatu negara di tingkat regional

maupun global. Masing-masing Calon Presiden telah menjabarkan agenda 5 tahun mereka untuk membangun iklim investasi.

Meningkatkan Infrastruktur. Masing-masing kandidat memiliki target cukup ambisius dalam mengatasi kendala buruknya infrastruktur. Hal ini akan meningkatkan secara drastis belanja infrastruktur. Baik Prabowo maupun Jokowi diperkirakan akan mengalokasikan belanja negara cukup besar dalam membiayai pembangunan jalan, irigasi, jaringan energi, kawasan ekonomi, hingga

pasar tradisional. Dengan terpilihnya Hatta Rajasa sebagai Calon Wapres, agenda MP3EI yang memerlukan pembangunan infrastruktur senilai Rp. 1.400 triliun hingga 2019 turut menjadi bagian dari program yang ditawarkan kubu Prabowo.

MEMBANGUN IKLIM INVESTASI

Strategi	Jokowi	Prabowo
Target	<ul style="list-style-type: none"> Iklim investasi peringkat terkemuka di Asia. Menurunkan biaya logistik 5% per tahun. Rasio kelistrikan meningkat hingga 100%. Menghapus subsidi BBM secara bertahap dan menurunkan harga energi 20%. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasokan listrik mencapai 100% kebutuhan nasional. Subsidi BBM Berkurang.
Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Infrastruktur jalan baru 2.000 km, 10 pelabuhan baru, 10 bandara baru, penambahan 76 rute perintis, bandara utama khusus barang Membangun monorail dan under ground untuk menghubungkan bandara dan pelabuhan dengan pusat kota, dan menurunkan 30% penggunaan kendaraan pribadi. Membangun 10 kawasan industri baru berikut kawasan hunian buruhnya. Revitalisasi 5.000 pasar tradisional. 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pembangunan infrastruktur di 6 koridor MP3EI dengan anggaran Rp. 1.400 Tn (10,32% APBN s.d 2019). Pembangunan jalan nasional baru 3.000 km, rel kereta 4.000 km. Pengembangan kawasan ekonomi khusus selama 7 tahun dengan investasi pemerintah \$2,25-3 milyar. Revitalisasi pasar tradisional.
Regulasi dan Layanan Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi perijinan menjadi 15 hari. Penerapan Standar Nasional Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Memangkas birokrasi dari pusat hingga daerah. Menurunkan waktu dan biaya angkut di pelabuhan.
Riset, dan HAKI	<ul style="list-style-type: none"> Menaikkan anggaran riset, dan insentif untuk perlindungan dan promosi HAKI di dunia internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI dan pengembangan industri kreatif. Indonesia pusat pengembangan keuangan syariah dan industri kreatif muslimah, dan membangun kampung kreatif di kab/kota potensial
Bahan baku dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung pengesahan UU Sistem & Komite Pengawas Ketenagakerjaan dan UU Sistem Pengupahan & Perlindungan Upah. Insentif bagi industri yang menghasilkan bahan baku dan barang modal sederhana. Pengembangan Industri pengolahan sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan regulasi industri pengolahan padat karya. Harmonisasi hubungan industrial.
Energi	<ul style="list-style-type: none"> Transformasi 30% transportasi berbasis BBM kepada BB Gas, untuk mengurangi subsidi dan menurunkan harga energi 20%. Merealisasikan penghematan subsidi BBM (sebagian besar impor) untuk membangun <i>Biofuel Energy</i> (produksi domestik). Insentif untuk mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur energi nasional. Disinsentif kepada teknologi yang tidak memenuhi <i>minimum operational performance standards</i> hemat energi. Mengurangi 30% penggunaan kendaraan pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> Merevisi UU Migas. Menyediakan 2 jt ha lahan baru untuk produksi bio energy. PLT Panas bumi dan air kapasitas 10.000 MW, dan pasokan mencapai 100% kebutuhan nasional. Pendirian kilang-kilang minyak bumi, pabrik etanol dan DME, dan transmisi/ distribusi oleh BUMN dan swasta. Konversi BBM kepada Gas dan sumber energi terbarukan bagi PLN. Mengelola subsidi BBM terhadap orang kaya melalui pajak dan cukai dan penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Meningkatkan Layanan Administrasi. Untuk mengatasi kendala dalam layanan administrasi Prabowo mengagendakan pemangkasan rantai birokrasi mulai dari pusat hingga daerah dan memperbaiki pelayanan di pelabuhan dengan menurunkan waktu dan biaya angkut.

Jokowi menawarkan untuk mempersingkat waktu layanan administrasi perijinan menjadi cukup 15 hari saja dan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Upah Buruh vs Produktifitas. Tuntutan kenaikan upah buruh kerap dinyatakan sebagai hal yang mengganggu iklim investasi karena tak diimbangi oleh produktifitas. Meskipun demikian,

upah terendah Indonesia berada pada peringkat ketiga setelah Kamboja dan Vietnam. Di sisi lain, buruh menolak argumen produktivitas rendah yang kerap ditimpakan kepada mereka sebagai penyebab.

Industri yang masih menggunakan peralatan dan mesin berusia tua, kendala pasokan energi, hambatan birokrasi dan perijinan, kondisi infrastruktur yang buruk, kemacetan, dan pungutan liar yang masih marak telah menyebabkan biaya logistik relatif tinggi, sehingga produktivitas secara keseluruhan rendah.

Sejak tahun 2000, kenaikan upah buruh riil rata-rata hanya 2,7% per tahun, dibandingkan GDP yang mencapai 5,4%.

Untuk memecahkan persoalan ini, Jokowi mendukung pengesahan Undang-Undang tentang Sistem dan Komite Pengawas Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah.

Sementara Prabowo berfokus pada upaya membangun harmonisasi hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah. Serta memperbaiki regulasi industri pengolahan padat karya.

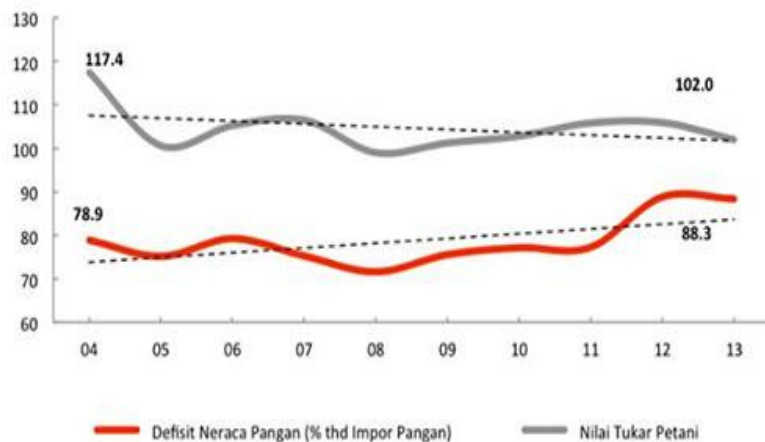
Menjamin Pasokan Energi. Untuk memenuhi kebutuhan energi, Prabowo maupun Jokowi menetapkan target rasio kelistrikan 100% secara nasional pada 2019. Sementara untuk memenuhi

kebutuhan energi dan melepaskan ketergantungan dari impor BBM, Prabowo lebih berorientasi pada peran negara sebagai *leading sector* dalam: mendorong produksi energi alternative, dengan membuka 2 juta hektar lahan baru untuk menghasilkan *bioenergy*, pemanfaatan tenaga panas bumi dan air untuk mencapai pasokan listrik 100%, pembangunan kilang-kilang baru, jaringan distribusi/transmisi oleh BUMN/Swasta dan mengkonversi penggunaan BBM kepada gas.

KETAHANAN PANGAN



Strategi	Jokowi	Prabowo
Target	<ul style="list-style-type: none"> Impor pangan terkendali, ekspor pangan meningkat. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak Spesifik
Program	<ul style="list-style-type: none"> Penghentian konversi lahan produktif; Perbaikan irigasi di 3 juta Ha sawah dan 25 Bendungan dan Pembangunan 1 jt Ha lahan pertanian kering di luar Jawa & Bali. Land Reform dan program kepemilikan tanah 9 juta Ha. Meningkatkan kepemilikan lahan petani gurem dari rata-rata 0,3 Ha menjadi 2 Ha per KK Tani. Pendirian Fasilitas Pasca Panen; Pembangunan 100 sentra perikanan terpadu. Pendirian Bank Tani dan UMKM; 	<ul style="list-style-type: none"> Membuka 2 jt Ha lahan baru untuk tanaman pangan Insentif fiskal untuk pembiayaan industri pengolahan pangan oleh BUMN atau BUMN-Swasta. Membangun pabrik pupuk milik petani kapasitas 4 jt ton. Menjamin harga pangan yang menguntungkan petani melalui kebijakan harga dan stock. Membangun irigasi dan pelabuhan perikanan di pesisir. Meningkatkan alokasi anggaran untuk riset pangan Rp. 10 triliun. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan.



Adapun Jokowi cenderung memilih skema memperbaiki tata niaga dengan skema insentif dan disinsentif dalam mendorong penggunaan teknologi yang hemat energi dan mendorong konversi dari BBM kepada *biofuel*. Jokowi juga bermaksud mendorong partisipasi swasta dalam membangun infrastruktur energi.

Riset dan Hak atas Kekayaan Intelektual. Iklim investasi saat ini semakin diperburuk dengan Indeks Perlindungan atas Kekayaan Intelektual Indonesia pada 2013 yang hanya mencapai angka 4,9 dari skala 10 dan berada pada peringkat 81 dari 133 negara. Posisi ini menempatkan negara kita sama dengan Tanzania, Makedonia, Mali, Uganda, dan Zambia.

Prabowo menawarkan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI, pengembangan industri kreatif, membangun pusat pengembangan keuangan syariah dan industri kreatif muslimah, dan membangun kampung kreatif di kabupaten/kota yang memiliki potensi. Sementara Jokowi memilih untuk menaikkan anggaran riset dan memberikan insentif untuk perlindungan dan promosi HAKI di dunia internasional.

KETAHANAN PANGAN

Untuk program kedaulatan pangan, kedua kandidat berencana membuka lahan pertanian baru jutaan hektar. Data memang menunjukkan bahwa nilai tukar petani tidak mengalami perkembangan yang berarti. Bahkan cenderung menurun selama 10 tahun terakhir (102.0 pada 2013). Sementara di sisi lain, serbuan impor bahan pangan terus meningkat.

Defisit neraca perdagangan pangan mencapai 88,3% dari total impor pangan pada 2013. Situasi ini menyebabkan selama 10 tahun terakhir ada 5,1 juta rumah tangga petani terpaksa berpindah profesi karena lahan minim milik mereka tak lagi mencukupi untuk menciptakan penghasilan dari usaha tani. Alhasil, indeks ketahanan pangan (*food security index*) Indonesia hanya menduduki

urutan ke 72 dari 109 negara, dengan skor 46,5 untuk skala 100 (2014, IU).

Baik Prabowo maupun Jokowi memilih kebijakan ekstensifikasi yang masif dan "lapar lahan". Diperkirakan kebijakan ketahanan pangan kedua kandidat akan berhadapan dengan persoalan-persoalan sosio-ekologis, terutama kebijakan pembukaan jutaan hektar areal pertanian baru.

BAGAIMANA MEREKA MEMBIAYAI PROGRAM PEMBANGUNAN?

Menteri Keuangan M. Chatib Basri menyatakan diperlukan pengetatan fiskal ekstra untuk menekan belanja dan mendorong penerimaan, karena defisit anggaran tahun 2014 berpotensi mencapai 4,96 persen terhadap PDB. Padahal Undang-Undang Keuangan Negara mematok defisit anggaran maksimum 3% terhadap PDB.

Perkiraan melebarnya defisit APBN 2014 disebabkan oleh melemahnya rupiah, menurunnya penerimaan akibat pertumbuhan yang terkoreksi oleh penurunan harga produk tambang, dan meningkatnya belanja subsidi BBM.

Calon Presiden Nomor Urut Satu, Prabowo, dalam dokumen visi-misinya menetapkan kebijakan defisit anggaran 1% terhadap PDB, sedangkan Jokowi tidak menentukan target defisit anggaran.

Memangkas Belanja Kegiatan Tak Produktif?. Salah satu isu yang sering muncul dalam alokasi anggaran Pemerintah adalah belanja kegiatan yang tak produktif dan belanja perjalanan dinas yang tinggi pada lembaga pemerintah. Kedua kandidat tidak menunjukkan agenda spesifik untuk merespon isu ini. Kedua kandidat akan menggunakan sistem imbalan dan sanksi (insentif/disinsentif) untuk mendorong belanja yang efektif dan menekan kebocoran.

Bagaimana Mereka Meningkatkan Penerimaan Pajak? Calon Presiden Nomor Urut Dua, Jokowi,

menetapkan target rasio pajak pusat terhadap PDB (*Tax Ratio*) mencapai angka 16% dari PDB pada tahun 2019, meskipun tanpa menetapkan target pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Prabowo tidak menentukan target spesifik terkait rasio pajak, namun menargetkan APBN Rp. 3.400 triliun (19% dari PDB) pada 2019, dengan pertumbuhan ekonomi di atas 10%.

Selama Pemerintahan SBY rasio pajak pusat terhadap PDB tidak pernah jauh melebihi prestasi yang dicapai oleh Orde Baru meskipun PDB telah tumbuh jauh dan APBN telah melebihi Rp.1.500 Triliun. Bandingkan dengan periode awal reformasi yang berada di bawah Rp. 500 triliun.

Apakah Kedua Kandidat Akan Meningkatkan Utang Dalam Negeri? Meningkatnya utang luar negeri swasta telah mendorong rasio utang luar negeri Indonesia menjadi 30,24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2013. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di ASEAN, di mana pada tahun 2012 Singapura mencapai 100%, Thailand 41,6% dan Malaysia 52,5%.

Sejumlah *emerging countries* juga memiliki rasio lebih tinggi. Brasil dan India, misalnya, mencapai angka 68%. Sama-sama mengusung kedaulatan ekonomi, kedua Kandidat memiliki kebijakan untuk menekan rasio utang luar negeri agar semakin menurun.

Prabowo memilih untuk menghentikan pinjaman luar negeri baru pada 2019, namun akan meningkatkan pembiayaan infrastruktur dengan menerbitkan obligasi infrastruktur. Jokowi memilih untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB secara bertahap, utang baru hanya untuk belanja produktif dengan *multiplier effect* tinggi di masa mendatang.

Bagaimana Mereka Menekan Subsidi Energi? Subsidi energi selalu melebihi perkiraan selama lima tahun Pemerintahan SBY. Kedua Kandidat sama-sama mengusung jargon membangun kedaulatan energi.

Prabowo akan mengurangi subsidi energi dalam APBN. Untuk mengelola subsidi secara efektif, Prabowo akan menerapkan pajak dan cukai bagi masyarakat kaya. Adapun Jokowi menawarkan penghapusan subsidi energi dari APBN secara bertahap dengan menetapkan target spesifik berikut: mentransformasi 30% transportasi berbasis BBM kepada BBGas untuk mengurangi subsidi dan menurunkan harga energi 20%, merealokasikan penghematan subsidi BBM (sebagian besar impor) yang diperkirakan mencapai Rp. 60 triliun untuk membangun *Biofuel Energy* (produksi domestik) dan menurunkan 30% penggunaan kendaraan pribadi. Jokowi juga akan memberi disinsentif bagi industri yang tidak hemat energi dan insentif bagi industri otomotif yang memproduksi kendaraan menggunakan bahan bakar non BBM.

Stabilitas Nilai Tukar dan Inflasi. Kedua Kandidat tidak menjabarkan secara khusus apa kebijakan mereka untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menekan laju inflasi, kendati Jokowi sempat mendapatkan pujian dari Gubernur Bank Indonesia sebagai Kepala Daerah yang berhasil ikut menekan inflasi pada tahun 2013.

Kementerian Keuangan memperkirakan setiap pelemahan rupiah sebesar Rp. 100, akan menyebabkan kenaikan defisit APBN sebesar Rp. 3-4 triliun. Jokowi berencana menerapkan kebijakan diversifikasi portofolio asing, namun tak menjelaskan secara tajam efek kebijakan ini terhadap stabilitas nilai rupiah.

Pembiayaan Non APBN. Agenda ambisius kedua Kandidat diperkirakan membutuhkan dukungan pembiayaan non APBN yang cukup besar. Tim ekonomi kedua Kandidat tampaknya menyadari hal ini. Untuk itu Prabowo menawarkan pembentukan Bank Infrastruktur, Bank Tani dan Nelayan serta pengembangan pembiayaan bersama swasta melalui suatu *Public Private Partnership* dengan *private finance initiative* yang memiliki *cost of money* sedikit di atas SBN.

Sementara Jokowi menawarkan kebijakan pembiayaan non APBN melalui pembentukan Bank Tani dan UMKM, kemitraan dengan swasta dan gerakan menabung nasional. Upaya yang terakhir ini akan memiliki keterkaitan dengan upaya pencapaian target inklusi keuangan ke angka 50. Baik Prabowo maupun Jokowi diperkirakan akan menghadapi persoalan untuk meningkatkan pembiayaan non APBN.

CATATAN PENUTUP: PERANGKAP PEMBIAYAAN ASING

Bagaimanapun pembentukan institusi keuangan dengan fungsi khusus membutuhkan waktu tak sebentar untuk bisa efektif. Kedua Kandidat memiliki gagasan yang berisiko tinggi dan mengalami kegagalan untuk menggunakan skema non APBN dalam membiayai program pembangunan mereka. Kegagalan pembiayaan non APBN ini, jika terjadi, diperkirakan akan menyebabkan kedua Kandidat dihadapkan pada pilihan meningkatkan utang Pemerintah.

Pemerintahan Jokowi relatif masih membuka diri untuk menggunakan kombinasi antara pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri baru dengan peruntukan terbatas, sementara Pemerintahan Prabowo akan meningkatkan utang dalam negeri Pemerintah melalui penerbitan obligasi.

Tekanan pembiayaan yang berlanjut, dalam batas tertentu, dapat menyebabkan desakan untuk melakukan privatisasi pengelolaan aset negara bernilai strategis. Jika pilihan ini tak terhindarkan, apakah investor domestik memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan ini? Jika tidak, diperkirakan praktik klasik pengalihan kepemilikan semu akan terulang, dan aset strategis tetap dimiliki asing secara tak langsung.

Isu kebutuhan pembiayaan telah berkembang jauh. Kebijakan ekonomi Prabowo yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam sempat diterpa rumor agenda nasionalisasi perusahaan tambang asing.

Sementara itu, Jokowi tampaknya menyadari pentingnya fungsi lembaga keuangan untuk mendukung agenda ambisiusnya. Namun lembaga keuangan juga merupakan pintu masuk modal asing untuk menguasai perekonomian domestik. Untuk hal tersebut Jokowi telah menggagas akan menyiapkan paket kebijakan pembatasan kepemilikan asing pada sektor perbankan melalui regulasi yang mengatur pembatasan penjualan saham bank kepada pemilik asing dan mengatasi tumpang tindih kepemilikan sektor riil dan perbankan.

Agenda lain adalah diplomasi untuk penerapan asas resiprokal bagi negara yang memiliki bank di Indonesia, memperjelas instrumen standarisasi, hingga menggunakan instrumen penguatan kelembagaan agar *micro finance* menjadi *bankable* dan berfokus pada sektor produktif. Seberapa kuat Jokowi dapat bertahan?

Penulis : Ahmad Alamsyah Saragih, Ekonom dan Senior Advisor PATTIRO.
Editor : Iskandar Saharudin, Peneliti Kebijakan, PATTIRO

Jl. Intan No 81, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.
No. 021 7591 5498, 021 7591 5546
Fax. 021 751 2503
E. info@pattiro.org
www.pattiro.org